

ABSTRACT

The financial statements is the most efficient for organizations to communicate with stakeholder groups that are considered to have an interest in controlling the strategic aspects of certain of the organization, so that the financial statements will be more transparent, accountable, can provide information and can be used to evaluate the performance of managerial and organizational. This study aimed to analyze the factors that affect the value of the local government financial reporting information. The study population was 48 SKPD Central Java Provincial Government. The sampling technique using sample selection aims (purposive sampling) consists of treasurer and accounting staff making up the financial statements. The data collection is done by distributing 96 questionnaires while the back and can be used as many as 83 questionnaires. Methods of data analysis using regression with SPSS software. The results of this study indicate that human resource competencies, Regional Financial Accounting System, the use of information technology, financial control area and internal control systems significant positive effect on the value of the local government financial reporting information.

Keywords: the value of local government financial reporting information, human resource competence, Financial Accounting System, the use of information technology, the control of regional finance and internal control system.

ABSTRAKSI

Laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok *stakeholders* yang dianggap memiliki ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi, sehingga laporan keuangan akan lebih transparan, akuntabel, dapat memberikan informasi serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah 48 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) terdiri dari bendahara pengeluaran dan staf akuntansi penyusun laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 96 kuesioner sedangkan yang kembali dan bisa digunakan sebanyak 83 kuesioner. Metode analisis data menggunakan Regresi dengan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik dari segi ekonomi adalah organisasi yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dari sektor swasta. Pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tapi pemberian pelayanan publik seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penengakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (Mardiasmo, 2009).

Dalam perkembangan sektor publik, fenomena yang banyak diamati adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya memberikan informasi kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus disusun dan disajikan menurut prinsip-prinsip dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan merupakan informasi keuangan yang menjadi suatu kebutuhan bagi para pengguna (*stakeholders*), Laporan keuangan disajikan kepada *stakeholders* untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Fungsi Laporan keuangan atau manfaat informasi akuntansi dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan perusahaan, mengendalikan perusahaan, dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan, dan pertimbangan serta pertanggung jawaban pada pihak ekstern.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept No. 1* tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah : (a) pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam membuat keputusan lain yang sejenis secara rasional, (b) pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam

memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembagian deviden ataupun pembayaran bunga dan pendapatan dari penjualan, (c) pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan, klaim atas sumber daya kepada perusahaan atau pemilik modal, serta (d) pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi perusahaan selama satu periode. Investor dan kreditor sering menggunakan informasi masa lalu untuk membantu menaksir prospek perusahaan (<http://beritaislamimasakini.com>).

Manfaat Laporan Keuangan Instansi Pemerintah antara lain : laporan keuangan untuk transparansi, laporan keuangan untuk akuntabilitas, memberikan informasi dan mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (<http://aklapmania-bpn.blogspot.co.id>).

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: (1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; (2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; (3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; (5) menyediakan informasi

mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; (7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD (<http://www.slideshare.net>).

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal : aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas

pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan pokok terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010) : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah daerah dianggap mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Apabila informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2013. Dalam Semester II Tahun 2013 BPK telah mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus senilai Rp 13.96 triliun.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki hasil-hasil penelitian tidak konsisten. Penelitian-penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain dalam penelitian Delanno (2013) memberikan temuan

empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian Roviyantie (2011) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yosefrinaldi, 2013). Sedangkan dalam penelitian Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Kholis (2013), kompetensi pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik mendorong pemerintah menerapkan akuntabilitas publik, salah satunya melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki nilai informasi untuk dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para *stakeholders*. Nilai informasi dari suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan Sistem

Pengendalian Intern. Masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan memotivasi untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Delanno (2013).

Penelitian ini akan menambahkan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen, penambahan variabel tersebut didasarkan pada argumen Roviyantje (2011) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena Pemerintah Jawa Tengah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dari BPK RI. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini diberi judul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukan entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan kontribusi terhadap kepentingan *stakeholder*. Pemerintah daerah berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada para *stakeholdernya* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat,

analisis, dan pihak lain). Laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok *stakeholders* yang dianggap memiliki ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi, sehingga laporan keuangan akan lebih transparansi, akuntabilitas, dapat memberikan informasi serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, banyak faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan antara lain : kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi, pengawasan keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi pemerintah daerah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan secara akurat, lengkap, dan informatif.